

# **POLA PELAYANAN KREDIT UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI PEDESAAN JAWA BARAT**

Mat Syukur, Sumaryanto, dan Chaerul Muslim<sup>1)</sup>

## **Abstrak**

Kajian mengenai ragam, bentuk dan prosedur pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah diharapkan mampu membantu memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang pola pelayanan yang paling sesuai untuk masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 1990 penelitian dilakukan di Jawa Barat Kecamatan Jonggol dan Nanggung Kabupaten Bogor dengan melakukan wawancara terhadap 105 rumah tangga contoh. Dari hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa (1) ragam dan pola pelayanan kredit pedesaan untuk golongan miskin sangat banyak, baik yang berbentuk kredit program (KUT, UPPKA) maupun komersial (LPK, BKPD, Bank Harian), (2) perilaku permintaan kredit masyarakat berpendapatan rendah dalam pasar kredit tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan tentang bunga kredit, tetapi juga pada kesederhanaan prosedur dan syarat perolehan kredit. Oleh karena itu untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber modal (kredit) dapat ditempuh dengan cara menyederhanakan prosedur dan syarat perolehan pinjaman dengan supervisi yang intensif.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Permasalahan**

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan selama empat Pelita telah banyak menampakkan hasil yang nyata. Indikator keberhasilan pembangunan pedesaan itu dapat dilihat dari aspek pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan.

Dari aspek pendapatan, indikator keberhasilan pembangunan pedesaan dapat ditinjau dari perubahan secara agregat pendapatan riil, perubahan struktur pendapatan dan distribusi pendapatan. Secara agregat pendapatan masyarakat pedesaan telah meningkat sehingga peta kemiskinan di Indonesia telah berubah. Data BPS menunjukkan bahwa akhir Pelita V jumlah penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan tinggal 27 juta atau 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu hasil-hasil penelitian Patanas yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian menunjukkan bahwa struktur perekonomian di pedesaan mengalami perubahan ke arah yang lebih berimbang.

Dampak langsung pembangunan di sektor luar pertanian melalui program-program perbaikan

prasarana maupun dampak tidak langsung dari terciptanya surplus dari sektor pertanian itu sendiri telah membuka kesempatan kerja dan berusaha di sektor luar pertanian. Pada akhirnya pendapatan rumah tangga dari sektor luar pertanian juga meningkat pangasanya sehingga struktur ekonomi pedesaan tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian. Makin berkembangnya sektor luar pertanian diharapkan mempertanggung perkeonomian desa. Pada satu pihak keadaan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, di lain pihak menunjang upaya pemerataan pendapatan.

Perkembangan lain yang mewarnai perekonomian pedesaan adalah kecenderungan yang mengarah pada ekonomi pasar. Komersialisasi pertanian, berkembangnya kesempatan kerja luar pertanian terutama sektor jasa telah mempercepat arus transaksi. Dalam kondisi demikian peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian pedesaan.

Pada kondisi demikian itu peranan kapital sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi semakin penting. Bahkan dalam beberapa kasus, distribusi

<sup>\*)</sup> Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

penguasaan kapital merupakan determinan dari distribusi pendapatan. Implikasinya adalah bahwa upaya pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan antara lain dapat didekati dari pemerataan penguasaan modal. Dengan kata lain, fasilitas kredit bagi masyarakat golongan miskin secara konseptual merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengangkat golongan ini.

Selama ini pemerintah telah mengusahakan fasilitas kredit murah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dapat disebutkan misalnya Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usahatani (KUT). Meskipun demikian fakta menunjukkan bahwa keragaan penyerapan dan pengembalian kredit murah tersebut masih menghadapi banyak masalah, terutama kredit program seperti Bimas dan KUT misalnya, mengalami kemacetan pengembalian kredit. KCK dan KMKP ternyata juga hanya sebagian kecil yang mampu menyentuh lapisan miskin. Di lain pihak, berkembangnya kredit-kredit komersial informal seperti kredit dari Bank Harian, rentenir dan kredit non komersial merupakan petunjuk bahwa masyarakat golongan miskin sebenarnya membutuhkan kredit.

Pada akhirnya permasalahan itu dapat diformulasikan pada pertanyaan-pertanyaan berikut: (a) Sejauh mana persepsi masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan terhadap kredit, (b) Bagaimana ciri dan pola pelayanan kredit untuk golongan berpendapatan rendah yang ada selama ini.

## METODE PENELITIAN

### Cakupan Penelitian

Ragam bentuk kredit di pedesaan adalah sangat luas. Di pedesaan hadir berbagai macam kredit yang bentuk maupun pola pelayanannya berbeda. Lebih dari itu, sasaran kredit pun berbeda.

Dalam penelitian ini kredit dikelompokkan menurut kategori berikut:

- (1) Kredit program: yakni kredit yang keberadaannya ditujukan untuk menunjang keberhasilan suatu program. Kredit ini biasanya dibiayai oleh dana pemerintah. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan biasanya lembaga perkreditan pemerintah.
- (2) Kredit komersial: yakni kredit yang ditawarkan oleh lembaga perkreditan baik yang bersifat formal maupun non formal yang ditandai motif ekonomi karena adanya pasar kredit.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi pedesaan, maka kredit program didominasi oleh kredit penunjang program pembangunan pertanian. Dapat disebutkan misalnya kredit Bimas padi, palawija, Bimas ayam, kredit usahatani, kredit intensifikasi tambak dan sebagainya. Disamping itu muncul pula Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Ekonomi Desa (KUED) dan sebagainya. Kredit ini merupakan unsur penunjang suatu program dan biasanya bunga kredit sangat rendah.

Kehadiran kredit komersial formal di pedesaan ditandai oleh eksistensi bank-bank perkreditan di pedesaan terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Di pedesaan yang perputaran uangnya tinggi dan transaksi kredit dalam volume besar kehadiran bank-bank swasta juga lazim ditemukan.

Kajian difokuskan pada pola pelayanan. Pola pelayanan diartikan sebagai suatu keragaan dari aturan main dalam proses terjadinya transaksi kredit berikut substansinya. Dalam pola pelayanan kredit, aspek-aspek yang harus dikaji adalah sebagai berikut:

- (a) prosedur pengajuan kredit
- (b) bentuk kredit yang diberikan
- (c) jangka waktu kredit
- (d) bunga kredit
- (e) jumlah minimum dan maksimum kredit
- (f) keragaan dari eksistensi kredit
- (g) tata-cara penyerahan kredit

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang mengacu pada aspek kemiskinan di pedesaan, penelitian ini difokuskan pada pola pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan.

### Lokasi Penelitian dan Penentuan Contoh

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *proposive*. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi ini adalah:

- (a) Jawa Barat merupakan wilayah terdekat dengan salah satu wilayah yang memiliki perputaran modal paling tinggi yakni DKI Jakarta.
- (b) Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang penduduknya memiliki tradisi perkreditan yang panjang.
- (c) Sebagian besar dari penduduk Jawa Barat tinggal di pedesaan.

Relevan dengan pertimbangan tersebut maka untuk memperoleh data primer lokasi penelitian yang terpilih adalah Kabupaten Bogor. Unit wilayah penelitian untuk analisa data primer adalah kecamatan dan sifatnya studi kasus. Sedangkan wilayah penelitian untuk kajian data sekunder adalah propinsi. Studi ini dilaksanakan pada tahun 1990.

Untuk studi kasus, dipilih Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Nanggung. Kecamatan Jonggol ditetapkan sebagai salah satu kecamatan contoh yang mewakili wilayah kategori sedang dalam daftar pendapatan per kapita. Selain itu di kecamatan ini juga terdapat salah satu lembaga kredit yang sasarannya adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yakni Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). Sedangkan Kecamatan Nanggung mewakili daerah miskin di Kabupaten Bogor.

Dari kecamatan terpilih masing-masing diambil dua desa contoh. Responden dipilih secara acak dari rumah tangga di empat desa tersebut. Jumlah contoh adalah sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah rumah tangga contoh.

Kecamatan	Jumlah responden
- Jonggol	45
- Nanggung	60
Jumlah	105

Kriteria rumah tangga miskin diproksi dari salah satu penguasaan asset yang oleh masyarakat setempat dianggap menentukan status sosial dan mudah diamati yakni kualitas rumah tinggal. Penentuan jumlah populasi dan kerangka contoh dilakukan dengan melakukan inventarisasi rumah tangga yang kualitas rumah tinggalnya termasuk kategori kurang baik, yaitu berdinding bambu, lantai tanah, atap rumbia atau sebagian genteng, jendela tidak ada atau sirkulasi udara jelek.

### Metode Analisis

Sebagai suatu penelitian yang memfokuskan pada kajian deskriptif, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan ekonometris. Sebagai bahan analisa digunakan informasi dan data sekunder dari instansi yang terkait dengan program pembangunan pedesaan yang menyediakan fasilitas kredit. Data

primer dari responden dianalisis secara tabulasi silang untuk memperoleh keragaan pola pelayanan kredit dan persepsi masyarakat berpendapatan rendah dalam hal perkreditan.

## KERAGAAN PERKREDITAN PEDESAAN

Peranan kredit dalam pembangunan ekonomi di pedesaan bukan saja sebagai pelancar pembangunan, tetapi kadang-kadang merupakan unsur pemacu adopsi teknologi yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Dapat dikemukakan misalnya kredit untuk sektor pertanian. Mulai dari kredit Bimas, KUT, Kredit TRI, kredit untuk intensifikasi tambak (Intam) dan kredit lainnya, tampak bahwa kehadiran kredit bukan hanya membantu petani mengatasi kesulitan modal tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk pemacu adopsi teknologi. Bahkan kadang-kadang juga berfungsi efektif sebagai perangkat introduksi. Hal terakhir ini dapat dilihat misalnya dari kredit Bimas. Kredit Bimas diciptakan untuk menunjang peningkatan produksi (khususnya padi). Bentuk kredit yang diberikan kepada petani berupa paket sarana produksi pertanian.

Di satu sisi bentuk paket itu merupakan garansi ketersediaan sarana produksi, di pihak lain berfungsi sebagai perangkat efektif pemacu aplikasi teknologi. Dengan berbentuk natura yang telah ditentukan komposisinya, memang kebebasan petani dalam pengambilan keputusan usahatani menjadi berkurang. Namun biaya sosial seperti itu terkompensasi oleh manfaat sosial yang berupa terpacunya aplikasi teknologi baru yang diintroduksikan. Fakta menunjukkan bahwa cepatnya adopsi teknologi baru berupa penggunaan pupuk buatan dan pestisida serta bibit unggul semata-mata bukan hanya disebabkan oleh keberhasilan aktivitas penyuluhan, tetapi juga peranan kehadiran paket kredit yang tepat. Keragaan partisipasi petani dalam adopsi teknologi baru memperlihatkan bahwa motivasi petani untuk menggunakan teknologi baru tidak jarang yang tidak dilandasi oleh suatu keyakinan akan manfaat yang akan diperolehnya.

### *Keragaan Kredit Program di Pedesaan*

Program pembangunan pertanian dan pedesaan disusun berdasarkan suatu perencanaan yang bersifat holistik. Meskipun demikian operasionalisasi

dari program yang disusun itu sering terpaksa secara parsial. Hal ini terutama disebabkan oleh luasnya permasalahan yang dihadapi, sehingga mustahil memasukkan semua peubah yang ada.

Peranan kapital dalam pembangunan ekonomi di pedesaan yang begitu penting merupakan salah satu argumen pemanfaatan kredit sebagai salah satu instrumen pendukung yang efektif dari pelaksanaan program pembangunan. Di bidang pertanian, industri, jasa maupun keluarga berencana hal ini telah diterapkan sejak awal Pelita.

Oleh karena kredit program keberadaannya terkait dengan program yang ingin dilaksanakan, maka sasaran kredit pada umumnya juga terbatas. Bahkan lembaga perkreditan yang dilibatkan juga terbatas, dan umumnya adalah lembaga perbankan pemerintah.

### *Kredit Usaha Tani (KUT)*

Sesuai dengan potensi sumberdaya di wilayah pedesaan, strategi pembangunan ekonomi di pedesaan ditempuh terutama dengan pembangunan sektor pertanian. Meskipun demikian bukan berarti bahwa pembangunan sektor non pertanian ditinggalkan. Sejak semula telah disadari bahwa *interdependensi* antar sektor perekonomian merupakan faktor kunci yang harus digarap. Namun keterbatasan anggaran pemerintah dan urgensi permasalahan perlunya swasembada pangan mendorong pemerintah harus membuat skala prioritas. Keputusan yang diambil adalah bahwa dalam pembangunan ekonomi pedesaan, pembangunan sektor pertanian perlu memperoleh prioritas utama.

Perlu digaris-bawahi bahwa dalam konsep KUT sebenarnya terkandung beberapa tujuan di luar unsur *capital policy*. Pelembagaan KUT diharapkan bukan hanya membantu petani mengatasi kekurangan modal tetapi juga: (a) memacu adopsi teknologi, (b) membantu program pengembangan koperasi di pedesaan (khususnya KUD), (c) melembagakan kelompok tani, (d) menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi penentuan kegiatan berusaha-tani yang demokratis dan sebagainya. Oleh sebab itu aturan main dalam pencairan/penyaluran KUT adalah sebagai berikut:

- (a) Kredit disalurkan melalui BRI Unit Desa.
- (b) Calon peminjam KUT adalah petani pemilik/penggarap dengan luas garapan maksimal 2 Ha.
- (c) Pengajuan KUT dari petani dilakukan secara berkelompok.

- (d) Nilai kredit yang diajukan oleh kelompok tani didasarkan atas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- (e) Kredit usahatani untuk padi dan palawija diberikan dalam bentuk natura (pupuk, pestisida, zat perangsang tumbuh) dan uang garapan.
- (f) Petani (kelompok tani) menerima kredit dari KUD dan mengembalikan ke KUD dalam bentuk uang atau gabah senilai kredit yang dipinjamkan ditambah bunga kredit yang berlaku. Bunga KUT adalah 12 persen, dan sejak MT 1989/90 meningkat menjadi 16 persen per tahun.

Perkembangan penyaluran kredit usahatani (KUT) padi dan palawija serta nilai kredit per hektar memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat selama periode 1985 – 1990 (Tabel Lampiran 1 dan 2).

### *Kredit dalam rangka Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA)*

Pemerintah menyadari sepenuhnya dari awal bahwa program peningkatan produksi pangan akan sia-sia apabila tidak didukung dengan upaya menghambat laju pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu berbagai program ke arah itu selalu berpacu dengan waktu dan sejak 1979/1980 BKKBN memperkenalkan program UPPKA dengan cakupan nasional dan bantuan dari berbagai sumber, misalnya APBN, USAID, Bank Dunia dan sebagainya (BKKBN, 1989).

Tujuan umum UPPKA adalah memperkuat kelembagaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS) serta mendukung kemandirian berkeluarga berencana.

Sasaran program ini adalah akseptor KB. Persyaratan bagi kelompok untuk memperoleh kredit UPPKA adalah: (1) bahwa kelompok tersebut beranggotakan minimal 55 persen akseptor KB dan wanita, (2) termasuk golongan masyarakat sosial ekonomi lemah, dan (3) mempunyai usaha ekonomi produktif.

Dana kredit disalurkan ke kelompok melalui BRI. Pinjaman BKKBN dari BRI ini tidak dikenakan bunga. Sedangkan pinjaman anggota dari BKKBN dikenakan bunga 0,5 – 4 persen per bulan dan waktu pengembalian 5 – 18 bulan. Pengembalian ditentukan selama 3 tahun dengan masa tenggang (*grace period*) 6 bulan.

Hasil penelitian PPLH-ITB bekerjasama dengan PSP-IPB dan ISS (Belanda) menunjukkan

bahwa pengelolaan kredit di tingkat kelompok berbeda-beda menurut kebijaksanaan masing-masing kelompok dalam konsultasi dengan PLKB (Petugas Lapang Keluarga Berencana). Pinjaman kepada anggota berkisar antara Rp 50.000,- - Rp 100.000,-. Di Jawa Barat sampai tahun 1989 jumlah uang yang beredar adalah Rp 278.291.000,-. Pemupukan modal kelompok terjadi melalui simpanan pokok, wajib dan sukarela.

### *Keragaan Kredit Komersial di Pedesaan*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kredit komersial pada studi ini difokuskan pada kredit-kredit formal dan non formal yang ada di tingkat kecamatan dan pedesaan, yaitu Bank Pasar (BP), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), BRI Unit Desa.

Di Jawa Barat, sampai bulan Juni 1989, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah 875 buah (Tabel 2). Dari jumlah ini 87 persen berlokasi di desa/kecamatan dan sisanya berada di kota/ibukota kabupaten.

Melihat komposisi yang demikian, sebenarnya kehadiran BPR di pedesaan sudah cukup besar. Hanya saja dari banyak penelitian, baik di Jawa maupun luar Jawa, pengambil manfaat lembaga ini sebagian besar adalah kelompok masyarakat elit desa/kecamatan. Hanya sebagian kecil masyarakat berpendapatan rendah yang akses pada lembaga ini (Tim Patanas, 1989 dan Patanas 1990).

Meskipun dari sejak awal BPR dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada lapisan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi di dalam kenyataannya kelompok ini tidak memiliki persyaratan yang lengkap sebagaimana yang dikehendaki oleh BPR. Persyaratan yang sangat menonjol yang tidak dimiliki oleh kelompok ini adalah agun-

an. Ketiadaan agunan adalah hambatan yang umum dijumpai pada kelompok berpenghasilan rendah untuk akses pada pelayanan kredit (Sumodiningrat, G., 1990). Oleh karenanya untuk dapat melayani kelompok miskin di pedesaan diperlukan upaya terobosan dengan pendekatan non-konvensional agar pelayanan kredit untuk golongan berpendapatan rendah dapat terlaksana.

Jumlah pinjaman yang disalurkan oleh BPR dan BRI-Udes di Jawa Barat sampai bulan Juni 1989 kurang lebih 1983 milyar rupiah. Sementara tabungan yang dapat dihimpun sebesar 98,5 milyar rupiah (Tabel 3). Dilihat dari rasio antara pinjaman dan tabungan yang semakin menurun dari tahun 1987 sampai 1989, khususnya LPK, maka ini berarti posisi tabungan semakin besar relatif terhadap pinjaman. Keadaan ini terjadi karena beberapa sebab. Munculnya produk-produk hadiah tabungan yang ditawarkan bank telah mendorong orang menabung. Di lain pihak situasi ekonomi yang tidak stabil membuat masyarakat kurang berani mengambil resiko berinvestasi pada sektor-sektor produktif, yang mengambil modal dari lembaga keuangan dengan tingkat bunga yang tinggi. Bila hal ini terus berlangsung maka dikhawatirkan dana yang terkumpul dari daerah pedesaan akan beralih ke perkotaan dan tidak seluruhnya kembali ke pedesaan. Lambat laun ketimpangan pembangunan antara desa-kota yang selama ini dikhawatirkan akan benar-benar dan terus berlangsung. Untuk itu harus dicari upaya guna menghambat arus dana dari desa ke kota (Rasahan C.A., dan M. Syukur, 1990). Salah satu cara yang kini dikembangkan adalah pengembangan agro industri pedesaan.

Tabel 4 menggambarkan rata-rata besarnya pinjaman per peserta nasabah. Dari sini terlihat bahwa dari 3 lembaga tersebut, sasaran LPK tergolong kelompok ekonomi lemah. Hal ini tercermin dari rata-rata pinjaman/nasabah yang paling

Tabel 2. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di perkotaan dan pedesaan sampai bulan Juni 1989 di Propinsi Jawa Barat.

Uraian	Daerah		Jumlah
	Kota	Desa	
1. Bank Pasar	25	8	33
2. BKPD	14	188	202
3. LPK	9	108	112
4. BRI-Udes	62	466	528
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>765</b>	<b>875</b>

Sumber: Danusaputro, M., dkk. 1990.

Tabel 3. Perkembangan pinjaman, tabungan dan rasio pinjaman terhadap tabungan pada Bank Pasar, LPK dan BRI Udes, tahun 1987-1989 di Jawa Barat.

Uraian	1987		1988		1989*)	
	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%	Juta Rp.	%
1. Pinjaman						
- Bank Pasar	30.829	25,0	36.811	23,4	41.860	21,4
- LPK	2.108	1,7	3.111	2,0	2.129	1,1
- BRI-Udes	90.210	73,3	117.294	74,6	149.527	77,3
2. Tabungan						
- Bank Pasar	28.400	45,5	30.951	35,4	33.102	33,6
- LPK	542	0,9	1.152	1,4	1.304	1,3
- BRI-Udes	33.464	53,6	55.451	63,3	64.127	65,1
3. Rasio pinjaman terhadap tabungan						
- Bank pasar	1,08		1,19		1,27	
- LPK	3,89		2,70		1,63	
- BRI-Udes	2,70		2,12		2,33	

Sumber: Danusaputro, dkk., 1990.

\*) sampai Juni 1989.

Tabel 4. Rata-rata jumlah pinjaman per peserta di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Jawa Barat, 1986-1989.

BPR	1986 (Rp)	1987 (Rp)	1988 (Rp)	1989 (Rp)
1. Bank Pasar	354.666	495.336	792.808	725.915
2. BKPD (Bank Karya Produksi Desa)	201.706	222.854	243.304	301.477
3. LPK (Lembaga Perkreditan Kecamatan)	135.877	125.400	140.352	183.970

rendah dari yang lain, yaitu berkisar antara Rp 125.000,- - Rp 183.970,-.

Dari LPK yang dikunjungi, yaitu LPK Kecamatan Jonggol, diperoleh kesan bahwa lembaga ini memberikan pinjaman untuk semua golongan masyarakat, umumnya adalah para pedagang pasar. Pinjaman diberikan kepada perorangan. Prosedur pinjaman relatif mudah dibandingkan dengan bank-bank komersial lain. Persyaratan pinjaman dapat dilihat pada Tabel 5.

Selain itu di pedesaan juga ditemukan bank keliling, yang sering disebut Kosipa. Bank ini termasuk jenis yang bank mempunyai daya jangkauan yang luas, bukan hanya dari sisi *range* pinjaman tetapi juga cakupan wilayah kerjanya.

Secara ringkas karakteristik beberapa pelayanan kredit pedesaan dapat dilihat pada Tabel 6. Bila di-

amati lebih jauh pada Tabel 6 terlihat bahwa Bank Harian memiliki jarak jangkauan yang luas. Hal ini dapat dilihat dari nilai kisaran pinjaman yang besarnya antara Rp 5.000,- sampai dengan Rp 50.000,-.

Berdasarkan pengamatan di lapangan selama ini, pola pelayanan kredit model Bank Harian dengan segala sifat yang melekat pada model ini tampaknya lebih mendekatkan lapisan masyarakat berpendapatan rendah pada fasilitas pelayanan kredit. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar dapat diciptakan lembaga sejenis Bank Harian yang dapat beroperasi dengan biaya yang rendah.

Pada pelayanan yang pasif biaya transport yang harus ditanggung oleh nasabah adalah sangat besar. Apabila jumlah pinjaman adalah Rp 25.000,- dan untuk memperoleh pinjaman tersebut nasabah

Tabel 5. Persyaratan pengajuan pinjaman di LPK (Lembaga Perkreditan Kecamatan) Jonggol, Kabupaten Bogor.

Jumlah pinjaman	Agunan	Rekomendasi Lurah dan Camat
1. Rp 100.000	Tidak ada	Ya
2. Rp 100.000 – Rp 1 juta	Seadanya (surat TV, surat meubel)	Ya
3. Rp 1 juta	Sertifikat resmi (tanah, rumah)	Ya

Tabel 6. Karakteristik pelayanan kredit pedesaan menurut jenis kredit, 1990.

Jenis kredit	Kelompok sasaran	Besarnya kredit (Rp)	Tingkat bunga	Lama pengembalian	Instansi terkait	Syarat perolehan	Sifat pelayanan
<b>Kredit Program</b>							
a. KUT	Kelompok tani	325.000	16%/tahun	1 musim tanam	BRI, Departemen Pertanian	– penggarap memiliki lahan – anggota KUD	Pasif
b. UPPKA	Kelompok akseptor KB.	50.000 – 100.000	0,5% – 4%/thn	6 – 12 bln	BRI, BKKBN	– Akseptor KB – Rekomendasi PLKB – Membentuk kelompok	Pasif
<b>Kredit Komersial</b>							
a. LPK/BKPD	Perorangan	100.000 – 1000.000	3% – 4%/bln	6 – 12 bln	Bank Pembangunan Daerah setempat	(1) Rp 100.000 tanpa agunan (2) Rp 100.000 – Rp 1000.000 (3) Rp 1000.000 jaminan sertifikat rumah, tanah. (4) Rekomendasi Lurah dan Camat	Pasif
b. Bank Harian (Kosipa)	Perorangan	5.000 – 50.000	15% – 20%/bln	40 hari	–	–KTP	Aktif

Keterangan: Pelayanan pasif adalah pola pelayanan dimana untuk mengajukan dan mengembalikan kredit, calon nasabah harus datang ke kantor lembaga keuangan yang bersangkutan (nasabah yang aktif). Dan pelayanan aktif adalah sebaliknya, yaitu lembaga keuangan secara aktif mendatangi calon nasabah-nasabah.

harus mengeluarkan ongkos transport sebesar Rp 500,- atau Rp 1000,-, maka dapat dihitung berapa persen biaya transport terhadap jumlah pinjaman yang diperoleh. Angka-angka di atas belum termasuk biaya materai. Selain itu waktu yang dibutuhkan nasabah untuk memperoleh pinjaman juga lebih lama.

Agunan adalah satu diantara beberapa syarat perolehan yang diperlukan untuk memperoleh kredit. Dari Tabel 6 juga tampak bahwa Bank Harian mensyaratkan agunan. Sedangkan pola pe-

layanan yang lain, secara umum masih mensyaratkan adanya agunan (kecuali untuk LPK/BKPD, untuk pinjaman di bawah Rp 100.000,-).

Dilihat dari kelompok sasaran, Tabel 6 menunjukkan bahwa sasaran kredit program adalah kelompok. Sementara itu untuk kredit komersial adalah perorangan. Secara kelompok memiliki beberapa kelebihan. Diantaranya adalah memudahkan pengawasan dan kontrol antar anggota oleh lembaga pengelola yang bersangkutan. Disamping itu pengelolaan kredit akan lebih mudah dan

ongkos transaksi menjadi semakin kecil. Sementara itu apabila sasaran kredit adalah perorangan, maka kelemahan utama yang timbul dari pola ini adalah bahwa kontrol antar nasabah praktis tidak ada. Sementara kontrol yang besar berada pada lembaga pengelola dana.

Apa yang dapat dikemukakan dari fenomena di atas adalah bahwa pada dasarnya pola pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah (miskin) akan dapat mencapai sasaran yang diinginkan apabila mempertimbangkan dan memasukkan unsur-unsur kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Sebagai contoh, masyarakat miskin umumnya tidak memiliki agunan, maka skim kredit untuk mereka sebaiknya tidak mempertimbangkan agunan. Dan lagi kelebihan masyarakat miskin adalah sanggup bekerja keras dan mempunyai rasa percaya yang tinggi.

#### Keragaan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Dalam Pasar Kredit

Sebelum membahas keragaan rumah tangga dalam pasar kredit perlu dijelaskan lebih dahulu beberapa hal berikut. Pertama, pasar kredit dalam penelitian ini mencakup permintaan dan penawaran kredit yang bersifat formal maupun non formal. Disebut formal jika prosedurnya mempunyai pola yang relatif tetap dan pemasok kredit adalah lembaga perkreditan formal. Di luar pengertian itu dapat dikategorikan sebagai non formal. Kedua, permintaan terhadap kredit bukan hanya kredit yang berupa uang, tetapi juga natura dan tidak dikhususkan pada kredit untuk kebutuhan investasi tetapi juga kredit konsumsi.

Di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah, lembaga perkreditan yang paling populer sebagai sumber perolehan pinjaman adalah lembaga perkreditan non formal yang menyediakan kredit konsumsi. Lebih dari separuh responden (51,5%) pernah melakukan pinjaman pada lembaga non formal ini (Tabel 7). Bahkan di Nanggung lebih dari dua pertiga responden pernah pinjam barang konsumsi dari lembaga non formal tersebut. Lembaga non formal ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu "pola biasa" dan "pola kemplangan". "Pola biasa" adalah pola kredit yang pengembaliannya reguler (setiap minggu atau setiap bulan) hingga pinjaman lunas. Sedangkan "pola kemplangan" adalah pola kredit yang pembayarannya dilakukan sekali saja pada akhir periode pinjaman.

Dari tabel tersebut dapat pula dilihat bahwa ragam sumber perkreditan formal di Jonggol lebih banyak dari pada di Nanggung. Di Jonggol selain BRI terdapat pula Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK). Dengan demikian secara umum pilihan sumber kredit yang dihadapi masyarakat Nanggung lebih sempit. Tetapi khusus bagi rumah tangga golongan miskin hal itu tidak sepenuhnya benar. Berbagai persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh kredit dari lembaga perkreditan formal pada umumnya merupakan kendala utama yang menyebabkan assesibilitas rumah tangga golongan miskin terhadap pasar kredit relatif rendah. Penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi (1987) menunjukkan bahwa prosedur perolehan kredit sering dianggap sebagai kendala utama penduduk pedesaan dalam memperoleh kredit.

Yang sangat menarik adalah bahwa rumah tangga berpendapatan rendah di Nanggung selama

Tabel 7. Tingkat partisipasi rumah tangga berpendapatan rendah dalam pinjaman menurut sumber kredit di Jonggol dan Nanggung, 1989.

Uraian	Kecamatan		
	Jonggol	Nanggung	Rata-rata
	%		
1. BRI Unit Desa	15,6	—	6,7
2. Bank Harian	8,9	8,3	8,5
3. Kredit konsumsi :	28,9	68,5	51,5
— Pola "biasa"	28,9	30,0	29,5
— Pola "kemplangan"	—	43,3	24,8
4. Lembaga Perkreditan Kecamatan	17,8	—	7,6
5. Arisan	—	1,7	1,0
6. Perorangan	6,7	15,0	11,4
7. Tak pernah pinjam	22,2	23,3	22,9

tahun 1989 tidak ada yang memanfaatkan lembaga perkreditan formal yang selama ini populer di pedesaan (BRI) sebagai sumber perolehan kredit. Dari sekitar 75 persen kalangan rumah tangga berpendapatan rendah yang pernah melakukan pinjaman selama tahun 1989, 68 persen pinjam kredit konsumsi, 8,3 persen pinjam uang dari Bank Harian, sekitar 2 persen dari arisan dan 15 persen pinjam dari orang lain secara perorangan. Jelas bahwa diantara mereka beberapa diantaranya memperoleh pinjaman tidak hanya dari satu sumber.

Kehadiran Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jonggol sangat membantu rumah tangga berpendapatan rendah dalam memperoleh kredit. Dibandingkan BRI misalnya, prosedur pengajuan kredit ke LPK relatif lebih mudah, terutama untuk volume pinjaman yang kecil.

Keterlibatan masyarakat berpendapatan rendah dalam pasar kredit dari lembaga perkreditan formal (dalam hal ini BRI) terutama adalah pinjaman kredit program, yakni kredit usahatani (KUT). Kesimpulan menarik dari fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Perilaku permintaan kredit masyarakat berpendapatan rendah dalam pasar kredit tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan tentang harga kredit (bunga).
- (b) Sebagian besar masyarakat pedesaan berpendapatan rendah terlihat lebih banyak pada lembaga non formal yang umumnya menyediakan kredit konsumsi.

Kesimpulan pertama dapat dibuktikan dengan menganalisa tingkat partisipasi rumah tangga dalam pasar kredit. Lembaga perkreditan formal yang sebenarnya menyediakan kredit dengan bunga yang lebih rendah seperti BRI dan LPK ternyata kalah populer dibandingkan lembaga kredit non formal seperti Bank Harian dan Penyedia Kredit Konsumsi

yang bunganya sebenarnya lebih tinggi. Hal ini juga terkait dengan bentuk pinjaman itu sendiri. Lembaga kredit non formal menyediakan kredit konsumsi maupun kredit uang (dari Bank Harian). Sementara itu lembaga perkreditan formal pada umumnya menyediakan kredit untuk tujuan produktif.

Pada umumnya responden melakukan pinjaman lebih dari satu kali dalam satu tahun. Bahkan untuk di Nanggung, beberapa responden melakukan peminjaman ke lembaga perkreditan non formal 2 – 3 kali dalam satu tahun (Tabel Lampiran 3). Ini berbeda dengan frekuensi pengajuan pinjaman pada lembaga kredit formal yang ternyata hanya dua kali dalam satu tahun.

Secara umum rata-rata jumlah pinjaman yang terbesar adalah dari pinjaman kredit program. Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pinjaman KUT yang diajukan responden sekitar Rp 122.000,- sementara itu pinjaman dari LPK hanya Rp 97.500,-. Kredit yang mereka ambil dari lembaga perkreditan informal berkisar antara Rp 500,- sampai dengan Rp 75.000,-.

Fenomena menarik dari jumlah pinjaman yang mereka ajukan ke lembaga kredit formal adalah bahwa jumlah kredit yang akhirnya mereka terima hanya sekitar 90 persen dari pengajuan. Ongkos administrasi berkisar antara 4,4 sampai 7,8 persen, dan tabungan sekitar 4,1 sampai 4,3 persen dari jumlah pengajuan pinjaman.

Hasil survey juga membuktikan bahwa jumlah kredit KUT tunai yang diterima petani pada umumnya hanya 88 persen dari jumlah kredit yang diajukan. Ditambah tabungan sebesar 4,1 persen maka kredit yang mereka terima sekitar 92 persen. Dengan demikian secara riil bunga KUT yang dibebankan kepada petani sebenarnya mencapai sekitar 20 persen per tahun.

Tabel 8. Rata-rata jumlah pinjaman KUT dari BRI dan kredit dari LPK di Jonggol tahun 1989<sup>1)</sup>.

Uraian	KUT dari BRI	Kredit dari LPK
Pengajuan pinjaman (Rp)	122.857 (100,0)	97.500 (100,0)
Ongkos administrasi (Rp)	9.571 (7,8)	4.270 (4,4)
Tabungan (Rp)	5.000 (4,1)	4.167 (4,3)
Yang diterimakan (Rp)	108.286 (88,1)	89.063 (91,3)

<sup>1)</sup> Angka dalam kurung menunjukkan persen terhadap pengajuan pinjaman.

Kredit pinjaman dari LPK memang bunganya relatif lebih tinggi yakni sekitar 1,5 – 3,0 persen per bulan. Tetapi kredit dari LPK tidak terikat persyaratan khusus karena bukan kredit program. Dari jumlah pinjaman yang mereka ajukan, rata-rata pinjaman kredit tunai yang mereka terima adalah sekitar 91 persen. Sekitar 4,4 persen merupakan biaya administrasi dan 4,3 persen berupa tabungan.

Keragaan pinjaman rumah tangga berpendapatan rendah dari Bank Harian tertera pada Tabel 9. Terlihat bahwa rata-rata pinjaman yang diajukan rumah tangga di Nanggung lebih besar daripada di Jonggol. Di Nanggung rataan kumulatif pinjaman adalah sekitar Rp 40.000,-, sedangkan di Jonggol hanya sekitar Rp 28.000,-.

Di Nanggung biaya administrasi pinjaman dari Bank Harian hanya 4 persen dan tabungan sekitar 6 persen, sehingga yang diterima adalah 90 persen dari total pinjaman yang diajukan. Sedangkan di Jonggol ongkos administrasinya hampir 6 persen. Dengan tabungan sekitar 7 persen maka yang diterima nasabah Bank Harian hanya 87 persen dari pengajuannya.

Hasil perhitungan dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa bunga pinjaman dari Bank Harian mencapai lebih dari 30 persen per bulan. Hasil penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi (1987) di daerah Jawa Timur bahkan menunjukkan bahwa bunga pinjaman dari Bank Harian mencapai 41 persen/bulan.

Tingginya suku bunga pinjaman dari Bank Harian bukannya tidak disadari oleh nasabahnya. Tetapi kepopuleran lembaga perkreditan ini terutama terletak pada pelayanannya yang sangat memudahkan nasabah. Nasabah didatangi oleh petugas Bank Harian di tempat tinggalnya ataupun

di tempat kerjanya, baik dalam pemberian pinjaman maupun dalam pengembalian pinjaman. Transaksi kredit sangat sederhana, tidak membutuhkan agunan dan hanya membutuhkan KTP sebagai jaminan kredit.

Nasabah Bank Harian yang terbanyak adalah pedagang kecil dan buruh di sektor informal yang pendapatannya tidak bersifat musiman sebagaimana petani. Dengan cara ini "turn over" dari kredit relatif tinggi.

Jenis kredit lain yang banyak dipinjam oleh rumah tangga berpendapatan rendah adalah kredit konsumsi yang berupa natura. Biasanya berupa alat-alat rumah tangga. Sebenarnya jenis kredit ini tidak tepat dikategorikan dalam pasar kredit, tetapi lebih sesuai pada pasar barang konsumsi. Relevansi dari kajian jenis kredit ini semata-mata untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang perilaku rumah tangga pedesaan dalam pasar kredit. Eksistensi lembaga ini di kalangan rumah tangga miskin menunjukkan secara lebih jelas gambaran dari kemiskinan itu sendiri. Kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi dengan nilai rata-rata Rp 20.000,- di Jonggol dan Rp 5.000,- di Nanggung tak dapat mereka penuhi secara langsung dari pasar komoditi tersebut dengan cara pembayaran tunai (Tabel 10). Bahkan pada musim paceklik, kebutuhan yang mendesak terhadap penggantian alat rumah tangga yang rusak dengan nilai di bawah Rp 2000,- pun terpaksa mereka penuhi dengan cara mencicil pembayarannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya terdapat segmentasi pasar kredit. Masyarakat golongan miskin terlayani secara efektif oleh kredit-kredit informal dengan bunga yang tinggi. Di pihak lain pasar kredit dengan bunga

Tabel 9. Rata-rata jumlah pinjaman kredit rumah tangga berpendapatan rendah dari Bank Harian di Jonggol dan Nanggung, 1989<sup>1)</sup>.

Uraian	Kecamatan		
	Jonggol	Nanggung	Rata-rata
Pengajuan pinjaman (Rp)	26.750 (100,0)	41.250 (100,0)	35.036 (100,0)
Ongkos administrasi (Rp)	1.550 (5,8)	1.625 (3,9)	1.593 (4,5)
Tabungan (Rp)	1.850 (6,9)	2.600 (6,3)	2.279 (6,6)
Yang diterima (Rp)	23.350 (87,3)	37.025 (89,9)	31.164 (88,9)

<sup>1)</sup> Angka dalam kurung menunjukkan persen.

Tabel 10. Rata-rata nilai pinjaman kredit konsumsi di Jonggol dan Nanggung, 1989.

Uraian	Jonggol	Nanggung	
		"Biasa"	"Kemplangan"
Rata-rata	21.415	5.655	8.684
Maksimum	75.000	20.000	50.000
Minimum	6.000	500	1.500

rendah terutama disalurkan oleh lembaga perkreditan formal, dan ini kurang terjangkau oleh golongan ini.

Sepintas fenomena seperti ini tampaknya seperti suatu anomali. Tetapi jika ditelaah lebih lanjut ternyata logis. Kendatipun kredit non formal pada umumnya bunganya tinggi, tetapi prosedur perolehannya sangat mudah dan fleksibel. Seandainya waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus kredit di lembaga perkreditan formal diperhitungkan sebagai ongkos transaksi, maka "imputed" bunga kredit dari lembaga kredit formal tak jauh berbeda dengan kredit dari lembaga non formal. Hal ini disebabkan oleh rataan kredit pinjaman rumah tangga golongan ini pada umumnya rendah.

Faktor lain yang mendorong terciptanya fenomena seperti itu adalah bahwa rumah tangga berpendapatan rendah pada umumnya memprioritaskan kemudahan prosedur perolehan kredit sebagai faktor utama yang mereka pertimbangkan (Tabel 11). Hal ini senada dengan hasil penelitian di daerah lain (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa ternyata lebih dari 50 persen rumah tangga di daerah penelitian menyatakan bahwa kemudahan dalam prosedur perolehan kredit merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengambil kredit. Suku bunga kredit merupakan faktor yang dipertimbangkan hanya oleh 30 persen rumah tangga di Jonggol dan 20 persen di Nanggung. Syarat agunan dipertimbangkan oleh 21 persen rumah tangga di Jonggol dan 30 persen di Nanggung. Perlu digaris bawahi bahwa dalam menyaring informasi ini, setiap responden berhak menjawab lebih dari satu pilihan. Oleh sebab itu jumlah persentasenya lebih dari 100 persen.

Dari uraian di atas tampak bahwa aksesibilitas rumah tangga terhadap lembaga perkreditan dapat ditingkatkan dengan menyederhanakan prosedur perolehan kredit. Dan faktor ini tentu saja berarti membutuhkan biaya dan mengandung re-

Tabel 11. Persepsi rumah tangga berpendapatan rendah di Jonggol dan Nanggung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam mengambil kredit dari lembaga perkreditan, 1989.

Faktor yang diamati	Kecamatan	
	Jonggol	Nanggung
	.....	% RT .....
Kemudahan prosedur perolehan	51	58
Tidak perlu agunan	21	30
J a r a k	30	20
Suku bunga	30	20
Jangka waktu pengembalian	10	8
Kesesuaian jumlah pinjaman	25	23
Tidak ada jawaban	16	20

Keterangan: RT = rumahtangga (responden).

siko yang lebih tinggi, karena suatu rangkaian prosedur diciptakan untuk membantu terciptanya mekanisme kontrol dalam manajemen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Pola pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah (miskin) sangat banyak ragam dan polanya. Meskipun sasaran pelayanan adalah masyarakat kecil, tapi tetap saja dari pola pelayanan yang ada terlihat ada segmen pasar diantara pola-pola yang ada. Masyarakat berpendapatan rendah dan tidak memiliki lahan umumnya terlayani oleh kredit-kredit komersial yang bersifat informal yang mempunyai tingkat bunga yang tinggi dan prosedur yang mudah. Sementara itu pola kredit dengan bunga rendah tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin karena keterbatasan persyaratan yang dimiliki oleh kelompok ini.
- (2) Lebih dari 50 persen rumah tangga di daerah penelitian menyatakan bahwa kemudahan prosedur perolehan kredit merupakan faktor

utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengambil kredit. Melihat hasil pengamatan penelitian ini, untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpendapatan pada pola pelayanan kredit dapat ditempuh dengan cara menyederhanakan prosedur dan syarat perolehan kredit. Cara ini mengandung resiko yang tinggi, namun apabila diimbangi dengan supervisi yang intensive, sebagaimana yang dapat dibuktikan oleh program-program kredit seperti LPK/BKPD dan Bank Harian, maka akan diperoleh hasil yang memuaskan.

- (3) Meskipun kelompok sasaran adalah golongan masyarakat berpendapatan rendah (miskin) namun dari pengamatan dan data yang ada, umumnya tingkat pengembalian kredit sangat tinggi. Untuk LPK/BKPD tingkat pengembalian kredit mencapai lebih dari 90 persen. Ini menunjukkan golongan masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan adalah layak kredit (bankable).
- (4) Seperti diketahui bahwa pola pelayanan kredit untuk golongan masyarakat miskin sangat beragam dan tersebar di beberapa propinsi di Jawa dan luar Jawa. Untuk itu perlu diupayakan suatu studi yang lebih luas untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalan program tersebut dalam mencapai kelompok sasaran yang diinginkan. Dari sini diharapkan diperoleh acuan model kredit untuk masyarakat miskin dengan tetap mempertimbangkan unsur komersial seoptimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 1988. Pedoman Operasional Pelaksanaan Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA). Edisi III. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1988.
- BKKBN, 1989. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA). Buku IV : Permodalan. BKKBN, Jakarta.
- Danusaputro, M., dkk., 1990. Peranan dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Kebijakan Pakto. Makalah Seminar tanggal 16 Januari 1990. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1987. Proyek Penelitian Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Laporan Daerah Jabotabek. LPPI, Jakarta.
- Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, 1989. Evaluasi dan Pengembangan Kredit Usaha Tani, Kasus Beberapa Propinsi di Indonesia. Laporan Penelitian Tahap Akhir; Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1987. Proyek Penelitian Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Laporan Daerah Jawa Timur. Kerjasama LPPI - Puslit Agro Ekonomi. LPPI, Jakarta.
- Rasahan, C.A. dan Mat Syukur, 1990. Karya Usaha Mandiri: Arah Baru Menjangkau Golongan Termiskin di Pedesaan. Makalah disampaikan pada Seminar "Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Golongan Termiskin di Pedesaan Dengan Bantuan Kredit". LPPI, Jakarta.
- Sumodiningrat, 1990. Kredit Untuk Rakyat Miskin. Makalah Bahasan pada Seminar "Upaya Meningkatkan Taraf Hidup Golongan Termiskin di Pedesaan Dengan Bantuan Kredit". LPPI, Jakarta.
- Tim Patanas, 1989. Hasil Penelitian Lembaga Perkreditan di Propinsi Jawa Barat. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Bogor.
- Tim Patanas, 1990. Kelembagaan dan Rekayasa Sosial Ekonomi Pedesaan di Jawa Timur (Kasus Perkreditan). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Tabel Lampiran 1. Perkembangan penyaluran kredit usahatani (KUT) padi dan palawija di Jawa Barat dari MT 1985/86 sampai dengan MT 1989/90.

Musim tanam	Areal (ha)		Jumlah kredit (Rp 000)
	Padi	Palawija	
MT 1985/86	21.408	1.552	1.814.340
MT 1986	5.200	35	444.382
MT 1986/87	31.377	1.329	2.998.290
MT 1987	52.217	—	6.365.783
MT 1987/88	165.049	5.739	25.486.352
MT 1988	74.853	3.135	11.290.308
MT 1988/89	281.444	6.313	24.011.914
MT 1989	39.964	3.627	14.898.631
MT 1989/90	118.170	2.424	25.162.090

Tabel Lampiran 2. Perkembangan rata-rata nilai kredit usahatani padi per hektar yang tersalur di Jawa Barat dari MT 1985/86 sampai 1989/90.

Musim tanam	Luas areal (ha)	Nilai kredit (Rp.000)	Nilai kredit per ha
MT 1985/86	21.408	1.687.804	78,84
MT 1986	5.200	422.734	81,30
MT 1986/87	31.377	2.952.496	94,10
MT 1987	52.217	6.365.783	121,91
MT 1987/88	165.408	24.874.850	150,71
MT 1988	74.853	10.807.005	144,38
MT 1988/89	281.444	23.189.662	82,40
MT 1989	39.964	13.154.274	329,15
MT 1989/90	118.170	24.209.736	204,87

Tabel Lampiran 3. Rata-rata frekuensi pengajuan pinjaman per tahun menurut sumber kredit di Nanggung dan Jonggol, 1989.

Sumber kredit	Nanggung		Jonggol	
	Rata-rata	Maksimum	Rata-rata	Maksimum
BRI Udes	—	—	1,14	2
Bank Keliling	1,80	3	1,50	2
Kredit Konsumsi	1,72	4	1,54	2
Kemplangan	1,46	3	—	—
LPK	—	—	1,50	2
Arisan	1,0	1	—	—
Perorangan	1,1	2	1,3	2